

KatalogBPS :4102.002.7311

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BONE 2011

(TAHUN TERBIT 2012)



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONE**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
TAHUN 2011

September 2012

Katalog BPS	: 4102.002.7311
Nomor Publikasi	: 73115.1206
Naskah/ Editor	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambaran Kulit	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
Dicetak oleh	: Percetakan CV 21 COM

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen data statistic yang semakin kompleks, khususnya data sosial, maka Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 .Publikasi ini merupakan publikasi yang kedua diterbitkan di BPS Kabupaten Bone

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembanunan manusia dan merupakan indikator yang berfungsi sebagai salah satu ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di KabupatenBone

Data yang digunakan untuk menganalisis halt ersebut di atas, adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) di samping data sekunder yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Kepada semuapihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya publikasi inidiucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi IPM selanjutnya.

Watampone, September 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONE
K e p a l a,**

**Ir. R U S T A N
NIP. 19661215 199301 1 001**

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1.1.Latar Belakang	1
	1.2.Tujuan Penulisan	3
	1.3.Sistematika Penulisan	4
BAB II.	METODOLOGI	5
	2.1. Konsep dan Definisi	6
	2.2.Sumber Data	10
BAB III.	GAMBARAN UMUM	11
	3.1.Letak Geografis	11
	3.2.Kependudukan	12
	3.3. Ekonomi (PDRB)	14
	3.4Potensi dan PemanfaatanSumberDayaAI	16
BAB IV.	KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA	17
	4.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia	18
	4.2Indeks Pembangunan Manusia	21
BAB V.	TENAGA KERJA	24
	5.1. Angkatan Kerja	24
	5.2. Tingkat Pengangguran	25
	5.3. Penduduk Bekerja	27
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	30
	6.1. Kesimpulan	30
	6.2. Saran	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

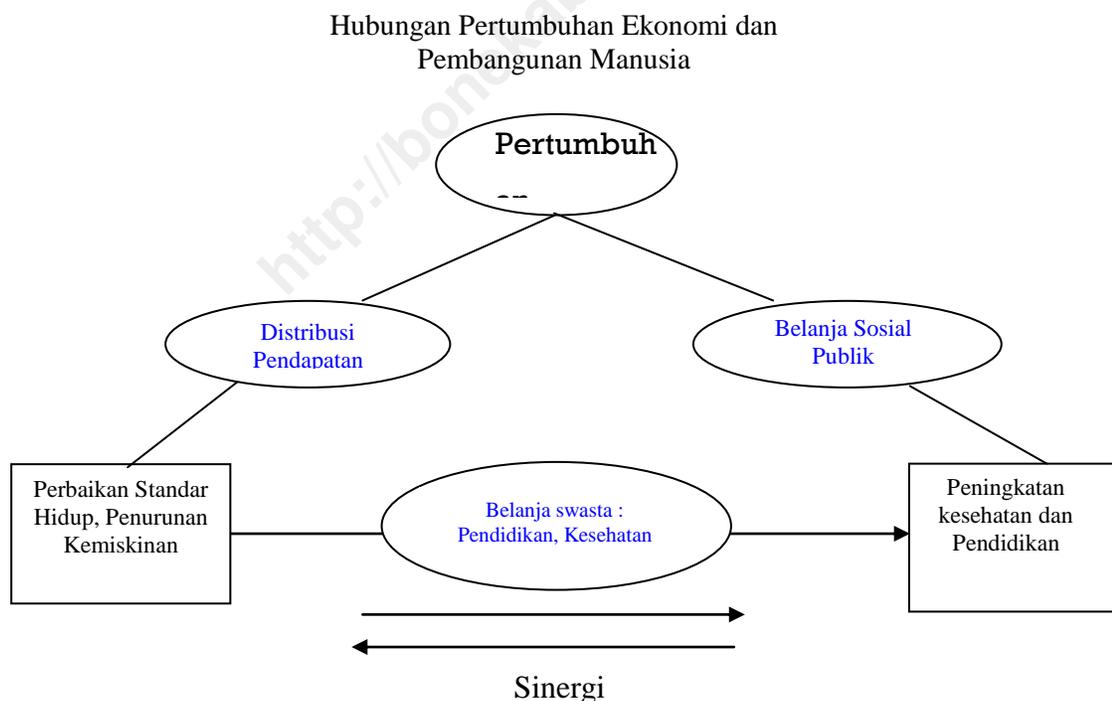
Dalam realitas pembangunan, ternyata pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, memunculkan pemikiran tentang perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi, yang memperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan. Perkembangan pemikiran tentang pembangunan (paradigma) bila dilihat mulai pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai mean/alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Adanya pergeseran-pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan terjadinya penyesuaian pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan, sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep "*basic need development*". Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical*

Quality of Life Index), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Perlunya mengukur paradigma pembangunan manusia menyebabkan berkembangnya berbagai ukuran dalam mengukur keberhasilan pembangunan, sejak tahun 1990 *United Nations Development Program (UNDP)* menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dinilai dengan membandingkan hasilnya antar waktu atau antar wilayah. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bone..

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara ringkas dapat dilihat pada gambaran berikut:



Keterangan :

Peningkatan produksi (pertumbuhan ekonomi) tidak dapat berjalan sendiri; bergantung pada distribusi pendapatan penduduk dan prioritas belanja pemerintah. Untuk mencapai peningkatan kesehatan dan pendidikan perlu perbaikan standar hidup penduduk yaitu penurunan tingkat kemiskinan dan tidak kalah pentingnya adanya partisipasi pihak swasta dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

1.2. Tujuan Penulisan.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone Tahun 2011 disusun dalam kerangka menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini disebut komposit karena telah mencakup indikator di bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat.

Tujuan penulisan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 Kabupaten Bone adalah ;

- a Memberikan data dan informasi tentang kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan peningkatan kualitas hidup manusia.
- b Sebagai sumber informasi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup manusia.
- c Dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dan memonitor program pembangunan yang telah dilakukan, agar prioritas pembangunan dapat ditentukan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup dalam pelaporan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone tahun 2011 hanya mencakup wilayah kabupaten dan tidak terinci sampai wilayah kecamatan. Cakupan tersebut disebabkan oleh keterbatasan besarnya sampel dan ketersediaan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009-2011 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wajo 2007-2011 Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan indeks pembanguna ini meliputi: bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian Bab Dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Bone yang diuraikan atas letak geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB) potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dan trend alokasi APBD. Kemudian Bab Empat membahas mengenai posisi pembangunan manusia yang meliputi; Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bab Lima membahas masalah kesehatan yang meliputi; angka kematian bayi dan harapan hidup, pelayanan kesehatan, status gizi, status kesehatan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat. Bab Enam membahas mengenai pendidikan yang meliputi; sarana dan prasarana pendidikann dan tingkat pendidikan selanjutnya Bab Tujuh adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan.

BAB II

METODOLOGI

Pemerintah tetap konsisten untuk berupaya mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Andanya informasi tersebut, sangat penting untuk evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan awal untuk melakukan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Informasi tentang keberhasilan pembangunan yang dicapai, dapat dilihat dari berbagai ukuran termasuk Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu di mulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini.

2.1. Konsep dan Definisi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] \dots\dots\dots(1)$$

Dimana : X(1): Indeks harapan hidup

X(2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) +
 $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah).

X(3): Indeks paritas daya beli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)

X(i)maks : Nilai maksimum X(i)

X(i)min : Nilai minimum X(i)

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
yang digunakan dalam penghitungan

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	732.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan kemiskinan baru

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*longevity*) yang diwakili dengan *usia harapan hidup* (*life expectancy at Age 0; e₀*), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu *angka melek huruf* (*literacy rate/ Lit*) dan *rata-rata lama sekolah* (*Mean Years of Schooling/ MYS*) dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh *purchasing power parity/paritas daya beli*. Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan PDRB riil perkapita.

2.1.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel e_0 dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”.

Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan Angka Harapan Hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 10 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel “ijazah/STTB tertinggi” yang dimiliki sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

Dimana :

MYS : rata-rata lama sekolah (dalam tahun)

f_i : frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan i .

S_i : skor masing-masing jenjang pendidikan i .

LS_i : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)

LS_i : S_i (bila tamat)

LS_i : $S_i + \text{kelas yang diduduki} - 1$ (bila masih bersekolah dan pernah tamat)

LS_i : $\text{kelas yang diduduki} - 1$ (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)

i : jenjang pendidikan (1,2,3, ...,10):

Tabel 2.2.
Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2	18
S3	21

2.1.3. Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted*)

real GRDP per capita), seperti juga yang digunakan oleh UNDP. Berbeda dengan laporan IPM 1996 yang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan menggunakan PDRB riil perkapita ini berarti mengasumsikan bahwa hasil dari PDRB daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk wilayah ini.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, yang dianggap kemampuan daya beli (U), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$U(y) = y'$	jika $y \leq y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)}$	jika $y' < y \leq 2y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)}$	jika $2y' < y \leq 3y'$
$= y' + 2(y-y')^{(1/2)} + 3(y-2y')^{(1/3)} + 4(y-3y')^{(1/4)}$	jika $3y' < y \leq 4y'$
dst.	

Dimana:

y = PDRB riil per kapita

y' = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (Garis Kemiskinan) yang dalam laporan ini nilai y ditetapkan sebesar Rp.540.378.- per kapita setahun.

2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011. Selain data survei tersebut, juga menyajikan data hasil Sensus Penduduk 2010.

Yang diungkap dalam penyajian laporan ini sebagai indikator atau data basis adalah data yang dihasilkan dari kor Susenas 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan sebagai pelengkap ulasan yang disajikan, sebagian data bersumber dari hasil pendataan yang dikumpulkan oleh berbagai instansi yang terkait, seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

<http://bonekab.bps.go.id>

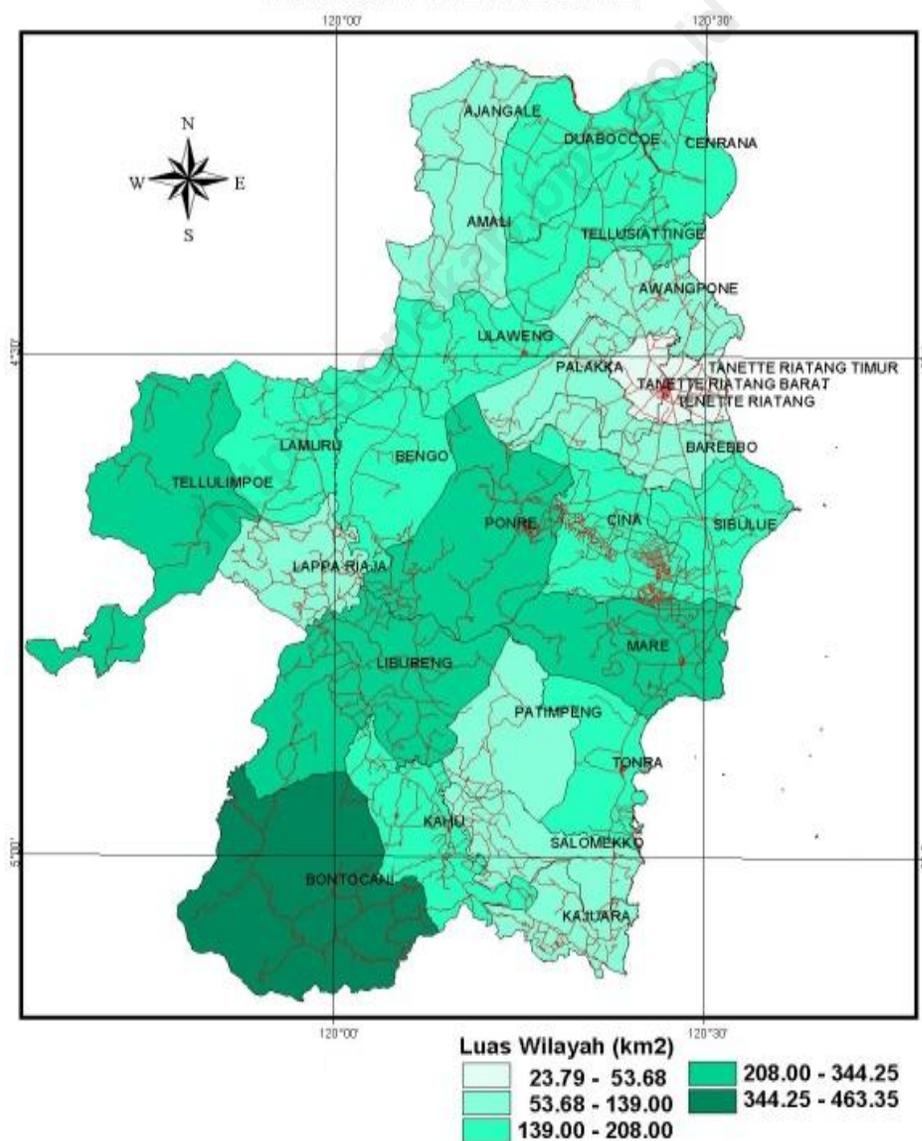
BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 174 Km dari ibukota provinsi. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BONE



Secara astronomis terletak pada posisi $4^{\circ}.13^{\circ}-5^{\circ}.06'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}.42'-120^{\circ}.40'$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppng, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dengan Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah sekitar $4.559,00 \text{ km}^2$. Daerah ini terdiri dari 27 kecamatan dengan 372 desa/kelurahan. Berdasarkan ketinggian tempat, maka wilayah dengan ketinggian 0-25 m terdapat 17,97 persen, ketinggian 25-100 m terdapat 22,29 persen, ketinggian 100-250 m terdapat 44,36 persen, ketinggian 250-750 m terdapat 13,74 persen, ketinggian 750-1000 m terdapat 13,76 persen, dan ketinggian 1.000 m ke atas terdapat 1,52 persen.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar $26^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di Wilayah Bone bervariasi, yaitu rata-rata $< 1.750 \text{ mm}$; $1750-2000 \text{ mm}$ dan $2500-3000 \text{ mm}$.

3.2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bone tahun 2010 terdapat 717.682 jiwa, naik pada tahun 2011 menjadi 724.905 jiwa yang terdiri dari 345.394 laki-laki dan 379.511 perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bone pada Tahun 2011 sekitar 91 yang berarti terdapat sekitar 91 orang

laki-laki diantara 100 perempuan. Penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki di daerah ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah karena belum dilakukan penelitian, akan tetapi berdasarkan data kelompok umur menunjukkan persentase yang lebih kecil penduduk laki-laki pada kelompok umur 20 tahun ke atas ketimbang penduduk perempuan. Hal ini diduga bahwa banyaknya penduduk laki-laki pada usia 20 tahun ke atas mempunyai kegiatan di daerah lain, baik untuk mencari nafkah, melanjutkan sekolah maupun kegiatan lainnya.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2010-2011 rata-rata 1,01 persen. Pertumbuhan penduduk di daerah ini harus tetap menjadi perhatian agar selalu terkendali. Hal ini karena banyak pihak yang menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Tingginya pertumbuhan penduduk dibanding dengan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan hanya untuk konsumsi penduduk, sehingga proporsi anggaran untuk pembangunan semakin menurun.

Pertumbuhan penduduk yang positif muaranya akan memperluas lahan hunian, sehingga mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Bone yaitu dari 153 orang/km² pada tahun 2006 naik menjadi 157 orang/km² pada tahun 2010, dan naik lagi menjadi 159 orang/km². Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menambah beban pembiayaan dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Namun demikian, jika diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, perbaikan ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk dapat terantisipasi dengan baik.

Dilihat dari angka partisipasi sekolah, ternyata di Kabupaten Bone Angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia sekolah dasar atau 7-12 tahun mencapai 95,72 persen, dengan

perincian APS laki-laki 95,75 persen dan APS perempuan 95,65 persen. Selanjutnya APS usia SLTP atau usia 13-15 tahun yaitu 82,99 persen lebih tinggi APS perempuan (84,99 persen) dari pada APS Laki-laki (80,98 persen). Untuk usia SLTA atau usia 16-18 tahun APSnya 50,94 persen dengan perincian laki-laki 55,74 persen, dan perempuan 45,97 persen. Berdasarkan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa makin kelompok umur usia pendidikan, maka APSnya semakin menurun.

3.3. Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Sedangkan harga konstan yang dimaksud adalah harga konstan Tahun 2000.

Bila diperhatikan selama periode 2007-2011, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Bone mengalami perbaikan, hal terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berada kisaran 6,01 persen sampai 7,63 persen. dengan pertumbuhan rata-rata 6,92 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di daerah ini dalam periode tersebut cukup menggembirakan.

Struktur ekonomi kabupaten Bone dapat di lihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangnya terhadap PDRB total Atas dasar harga berlaku (ADHB). Di Kabupaten Bone tahun 2010, peranan sektor pertanian terhadap perekonomian masih cukup besar yakni sebesar 49,09 persen, sedikit menurun pada tahun 2011 menjadi 47,73 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata-

rata 23,91 persen pada tahun 2010 dan 22,53 persen tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bone perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan.

Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2007-2011.

Tabel . 3.1.
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2007-2011

Tahun	PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (persen)	PDRB adh Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	4.423.743,58	14,58	2.590.298,03	6,01
2008	5.348.744,99	21,17	2.776.660,08	7,24
2009	6.412.649,40	19,89	2.985.922,41	7,54
2010	7.530.369,81	17,43	3.213.085,05	7,63
2011	8.835.528,87	17,33	3.412.322,54	6,20
Rata-rata	XXXX	18,03	XXXX	6,92

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Sektor lain mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bone adalah sektor jasa-jasa sebesar 18,08, sektor Konstruksi sebesar 8,20 persen, dan sektor perdagangan sebesar 7,69 persen. Sebaliknya yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya 0,68 persen,

Penghitungan PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB atas harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. Hasil olahan menunjukkan bahwa PDRB per kapita di Kabupaten Bone pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.498.684., dan tahun 2011 naik menjadi

Rp. 12.188.533,-. Angka tersebut bukan merupakan penerimaan secara riil merata di semua penduduk, tetapi menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan penduduk.

3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kondisi geografis Kabupaten Bone menggambarkan suatu wilayah yang menyimpan sumber daya alam baik darat maupun laut. Sebagai salah satu daerah pertanian, produksi padi sawah di daerah ini tahun 2011 menghasilkan 817.871 ton dengan luas panen 140.644 Ha, kemudian produksi jagung 197.707 ton dengan luas panen 39.634 Ha, dan berbagai produksi lainnya.

Jumlah produksi ikan tahun 2011 di Kabupaten Bone menurut jenis budidaya perikanan yaitu kolan 75 ton, tambak 61.180,98 ton, mina padi 44 ton, perairan umum 949,3 ton, dan laut 67.783,8 ton. Untuk produksi usaha perikanan tambak menurut jenisnya yaitu Udang sebanyak 2.084,0 ton, kepiting 1.393,4 ton, rumput laut 50.000,0 ton, dan bandeng sebanyak 7.421,6 ton.

3.5. Trend APBD

Realisasi penerimaan Daerah Otonomi Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp.850.738.458.365,20,-. Kemudian naik menjadi Rp. 1.072.555.172.285,15,- pada tahun 2011. Dengan kata lain selama satu tahun realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone meningkat sebesar 26,07 persen. Penerimaan daerah otonomi Kabupaten Bone tahun 2011 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,41 persen, dana perimbangan sebesar 96,24 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3,35 persen. Selanjutnya berdasarkan realisasi pengeluaran daerah otonom Kabupaten Bone, maka realisasi pengeluaran tahun 2011 sebesar Rp. 1.025.723.291.969,95,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 69,83 persen dan belanja langsung sebesar 30,12 persen.

B A B IV

KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia (*human development*) merupakan bagian yang penting dalam proses perbaikan ekonomi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas sumber daya manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, atau pun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain, termasuk kinerja ekonominya. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan karena manusia sebagai subjek dan obyek pembangunan. Oleh karena itu, sepantasnya jika manusia dijadikan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan manusia yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan baik kabupaten/kota, propinsi maupun nasional, mendorong untuk perlunya mengukur tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) suatu daerah. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

4.1.1. Indeks Kesehatan

Telah dijelaskan pada bab metodologi bahwa ukuran kesehatan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari Angka Harapan Hidupnya. Selanjutnya Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bone pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing tercatat sekitar 68,60 dan 69,00, kemudian pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing 69,35 dan 69,73, serta tahun 2011 sebesar 70,00. Sedangkan AHH Sulawesi Selatan tahun 2009, 2010 dan 2011 menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dengan angka Kabupaten Bone masing-masing yaitu sebesar 69,80, sebesar 70,00 dan sebesar 70,20. Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk variabel eksogen dapat dibuat daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH/e_0 di antaranya penolong persalinan. Diharapkan bahwa dengan semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya. Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan penanganan yang sudah terlambat. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis di Kabupaten Bone untuk masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2011 persentase penolong persalinan

terakhir pada balita yaitu; balita yang ditolong oleh tenaga medis terdapat sekitar 69,78 persen, dengan perincian persalinan ditolong oleh dokter 6,51 persen, bidan 62,25 persen dan tenaga medis lainnya 1,02 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat sekitar 30,22 persen balita yang proses persalinan waktu dilahirkan masih ditolong oleh tenaga non medis yang masih belum ada jaminan mengenai kelangsungan kesehatan baik ibu maupun bayi yang dilahirkan. Penanganan kelahiran yang benar merupakan salah satu harapan untuk dapat menekan atau meminimalisir tingkat mortalitas.

Indeks kesehatan Kabupaten Bone pada tahun 2008 tercatat sekitar 73,27 dan pada tahun 2009, dan 2010 serta 2011 masing-masing 73,91 dan 74,55 serta 75,00. Data tersebut menunjukkan perubahan yang relatif kecil, tetapi tetap mengindikasikan bahwa peningkatan derajat kesehatan yang telah dibangun pemerintah bersama masyarakat pada beberapa tahun terakhir menuju ke arah yang lebih baik.

Peningkatan indeks kesehatan bergerak di bawah 1 poin per tahun (12 bulan). Untuk meningkatkan satu poin umur harapan hidup atau angka harapan hidup, maka dalam satu tahun tidak terdapat satu orangpun meninggal dalam suatu wilayah. Kemungkinan ini sangat sulit terjadi, apalagi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi masyarakat yang berada pada negara berkembang. Diantara faktor tersebut yaitu faktor geografis, kondisi sosial masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal yang paling memungkinkan untuk meminimalkan resiko kematian adalah dengan cara memperbaiki berbagai faktor pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti meminimalkan angka kematian bayi (AKB), menurunkan angka kematian ibu dan menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, tetap diperlukan kerja keras di bidang kesehatan, terutama bagi pihak-pihak terkait untuk konsisten mengupayakan perbaikan disegala bidang, terutama perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan. Yang lebih penting lagi untuk mendokrak Indeks Kesehatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan juga perlu ditingkatkan.

4.1.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan pendidikan dihitung dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Bone masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada tahun 2008 AMH penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan variabel dalam penghitungan IPM tercatat sekitar 84,8 persen. Kemudian sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing 84,85 pesen dan 84,86 persen dan 86,41 persen. Angka melek huruf di Kabupaten Bone lebih rendah apabila dilihat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada tahun 2008 AMH 86,53 persen, kemudian pada tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing 87,02 persen, 87,75 persen dan 88,07 persen.

Selanjutnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2008 adalah 6,2 tahun, selanjutnya pada tahun 2009, 2010 dan 2011 rata-rata lama sekolah masing-masing 6,38 tahun, 6,70 tahun, dan 6,72 tahun . Ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bone baru menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar. Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah di propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 adalah 7,23 tahun, kemudian tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing 7,41 tahun, 7,84 tahun dan 7,92 tahun. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara angka terendah 6,10 tahun (Kabupaten Bantaeng) dan tertinggi 10,85 tahun (Kota Makassar).

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mean years schooling). Komponen pendidikan dalam IPM juga terbilang sulit untuk meningkat satu poin dalam kurun hanya satu tahun. Hal tersebut

karena hasil pembangunan pendidikan tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat, penghitungan lamanya orang bersekolah atau rata-rata lama bersekolah satuannya adalah tahun. Begitu juga dengan Angka Melek Huruf pada titik tertentu yang telah dicapai, maka peningkatannya akan terlihat bergerak cukup lambat. Indeks Pendidikan di Kabupaten Bone pada tahun 2008 adalah 70,32, tetapi pada tahun 2009 naik menjadi 70,74 dan tahun 2010 dan 2011 masing-masing naik menjadi 71,45 dan 72,53.

4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli

Indeks paritas daya beli berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan yang sulit untuk ditingkatkan, karena komponen kemampuan daya beli lebih mudah ditingkatkan kontribusinya dalam pembentukan IPM. Secara teori bahkan dapat berkali-kali ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hanya saja pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada meningkatnya daya beli masyarakat kalau pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemerataan pendapatan.

Daya beli penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2008 sekitar 633,9 ribu rupiah dan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing 638,01 ribu rupiah, 639,16 ribu rupiah dan 640,31 ribu rupiah. Dengan demikian, indeks daya beli Kabupaten Bone tahun 2008 yaitu 63,30 naik menjadi 64,25 tahun 2009. Indeks tersebut mengalami kenaikan setiap tahun dan pada tahun 2010 dan 2011 indeksnya menjadi 64,51 dan 64,78.

4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan hanya

diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia *secara keseluruhan* dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Tabel 4.1. Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007-2010

Kabupaten/Kota (terdekat)	2008		2009		2010		2011		
	IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov.	IPM	Rank Prov.	Reduksi shortfall 2009-2010
1. Gowa	69,37	15	70,00	15	70,67	15	71,29	14	2,11
2. Sinjai	68,74	18	69,21	19	69,53	20	70,16	19	2,09
3. Maros	69,85	13	70,56	12	71,12	13	71,74	13	2,16
4. Pangkep	68,30	21	69,07	20	69,43	21	69,89	22	1,49
5. Barru	69,54	14	70,30	14	70,86	14	71,09	15	1,16
6. Bone	68,96	16	69,63	16	70,17	17	70,77	17	1,99
7. Soppeng	70,76	11	71,26	11	71,89	10	72,23	11	1,22
8. Wajo	68,72	19	69,44	17	70,22	16	71,04	16	2,75
9. Sul-Selatan	70,22	xxx	70,94	xxx	71,62	xxx	72,14	xxx	1,85

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Keterangan : Ranging kabupaten/kota berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone pada tahun 2008 sekitar 68,96, berdasarkan peringkatnya menduduki urutan 16 dari 24 kabupaten/kota. Namun seiring dengan meningkatnya beberapa komponen pendukungnya maka pada tahun 2009 dan 2010 IPM Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 69,63 dan 70,17, dan peringkatnya pada tahun 2009 tetap peringkat 16 tetapi tahun 2010 peringkatnya turun menjadi peringkat 17.

Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Bone meningkat lagi menjadi 70,77 dan tetap pada peringkat 17. Peningkatan IPM pada suatu daerah merupakan bukti bahwa pembangunan manusia di daerah tersebut berjalan menuju arah yang lebih baik, hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Bone.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi. Maka dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Bone tergolong dalam kategori menengah.

Tiga peringkat tertinggi IPM kabupaten/kota tahun 2010 di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu masing-masing pada tiga kota, yaitu Makassar, Pare-Pare dan Palopo. Untuk kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto dan Takalar. Sedangkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan berada pada angka 72,14. Secara keseluruhan dari 24 Kabupaten/kota termasuk IPM Propinsi Sulawesi Selatan semuanya masih dalam kategori sedang.

Apabila dilihat menurut kabupaten yang dekat dengan Kabupaten Bone, maka IPM tertinggi tahun 2011 yaitu Kabupaten Soppeng yaitu 72,23 lebih tinggi dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kabupaten yang IPMnya lebih tinggi dari Kabupaten Bone selain Kabupaten Soppeng adalah Kabupaten Gowa, Maros, Barru, dan Wajo. Sedangkan kabupaten terdekat yang IPMnya lebih rendah dari Kabupaten Bone adalah Kabupaten Sinjai dan Pangkep.

BAB V

TENAGAKERJA

Bekerja merupakan hal yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi pekerjaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, aspek sosial terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi atas kemampuan dari individu, baik pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sektor ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat, tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan itu sendiri.

Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

5.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang terdiri dari dua komponen yaitu komponen angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Komponen angkatan kerja yang terdiri dari golongan yang *bekerja* dan *pengangguran* dan komponen bukan angkatan kerja yang terdiri dari golongan yang *masih bersekolah*, *mengurus rumah tangga* dan *lainnya*.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2011 penduduk usia kerja di Kabupaten Bone berjumlah 511.945 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja berjumlah 327.771 jiwa atau sekitar 64,02 persen dan bukan angkatan kerja sebanyak 184.174 jiwa atau 35,98 persen. Penduduk usia kerja di perkotaan terdapat 17,04 persen atau yang tinggal di pedesaan sebesar 82,96 persen. Banyak penduduk usia kerja di pedesaan karena jumlah penduduk di pedesaan memang lebih banyak.

**Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Bone Tahun 2011**

Kegiatan Utama	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	87.212	424.733	511.945
Angkatan Kerja	53.282	274.489	327.771
• Bekerja (%)	92,19	94,37	94,02
• Menganggur (%)	7,81	5,63	5,98
Bukan Angkatan Kerja	33.930	150.244	184.174
• Sekolah (%)	19,77	13,71	14,83
• Mengurus RT (%)	55,40	70,06	67,36
• Lainnya (%)	24,83	16,23	17,81
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,09	64,63	64,02
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,19	94,37	94,02
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,81	5,63	5,98

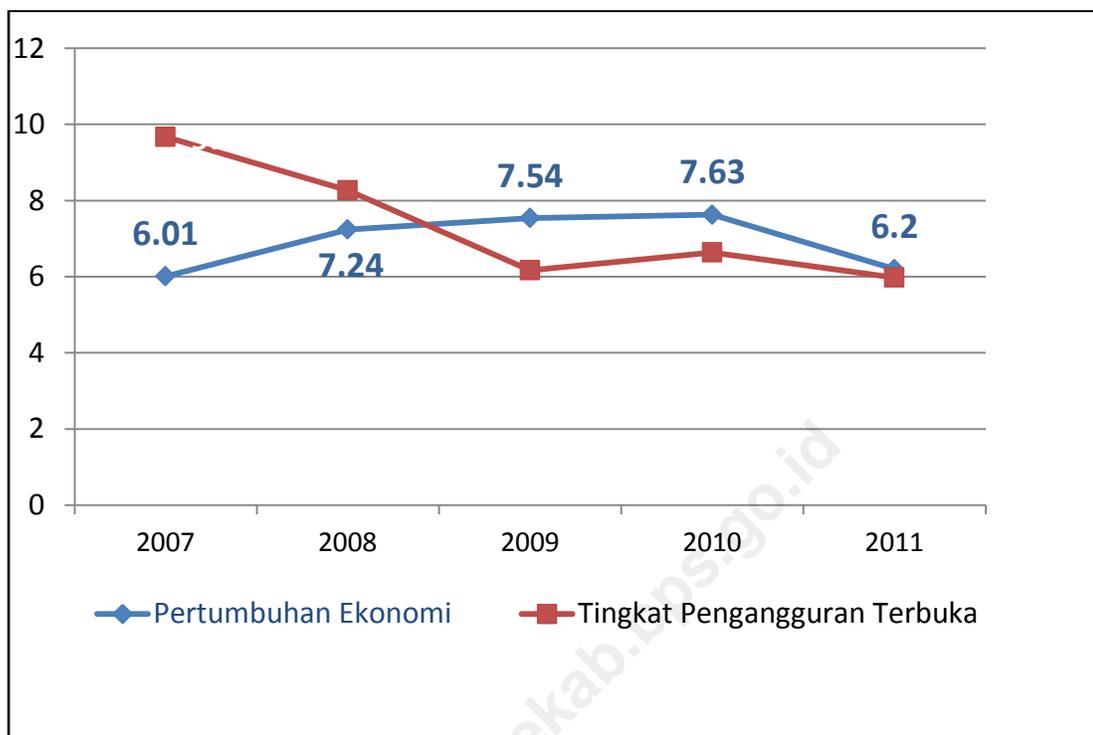
Sumber : Sakernas 2011

Tabel 5.1. menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bone tahun 2011 sebesar 64,02 persen. Dilihat status wilayah, maka TPAK di daerah pedesaan sebanyak 64,63 persen lebih tinggi dari TPAK di daerah perkotaan yaitu sebanyak 61,09 persen. Selanjutnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Bone 2011 sekitar 94,02 persen. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di pedesaan yaitu 94,37 persen, lebih tinggi dari TKK di perkotaan yaitu 92,19 persen.

5.2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif mencari pekerjaan. Ketidakeimbangan antara permintaan akan lapangan kerja yang semakin meningkat dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas, merupakan masalah utama dalam pengangguran. Tingkat pengangguran dijadikan sebagai salah satu parameter keberhasilan pembangunan karena dapat menimbulkan kerawanan sosial. \

Grafik 5.1. Perbandingan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bone 2007-2011



Berdasarkan Grafik 5.1, menggambarkan perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat pertumbuhan ekonomi selama periode 2007-2011. Nampak bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka cenderung turun. Untuk tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 1,43 persen, begitu pula tingkat pengangguran juga turun sekitar 0,66 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor-sektor yang dapat menambah penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan tingkat pengangguran terbuka akan turun. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka bisa disebut kinerja ekonomi yang berkualitas.

Tingkat pengangguran (terbuka) penduduk Kabupaten Bone tahun 2007 sekitar 9,67persen dan tahun 2008, 2009, dan 2010 TPT masing-masing 8,27 persen, 6,17 persen dan 6,64 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2011 sebesar 5,98 persen lebih rendah dari TPT Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,56 persen. Ditinjau menurut status tempat tinggal, maka TPT di perkotaan sebesar 7,81 persen lebih tinggi dari TPT di pedesaan sebesar 5,63 persen.

5.3. Penduduk Bekerja

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang berkembang dengan tetap fokus perekonomian agraris, karena masih sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sakernas 2011 (Tabel 5.2), sebanyak 55,58 persen penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja pada sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sekitar 17,70 persen dan sector jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 12,82 persen. Penyerapan tenaga kerja paling sedikit di sektor Industri pengolahan yaitu 3,95 persen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan tenaga kerja masih jauh yang diharapkan untuk menuju proses pembangunan yang menuju ke industrialisasi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa daerah yang penyerapan tenaga kerjanya yang lebih banyak di sektor pertanian, kehidupannya akan kurang sejahtera dari daerah yang penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak di sektor industri. Namun secara umum bahwa makin maju suatu daerah, maka sedikit penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menunjukkan pula bahwa sektor-sektor lain belum dapat diandalkan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Untuk memacu perkembangan sektor lain diperlukan iklim usaha yang kondusif.

Pola penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan sangat berbeda di daerah pedesaan. Penyerapan tenaga kerja di perkotaan paling banyak di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan jasa perorangan yaitu sebesar 33,63 perse, sedangkan di daerah pedesaan paling banyak di sektor pertanian yaitu 64,36 persen. Penyerapan tenaga kerja di perkotaan terdistribusi ke sekor lapangan pekerjaan yaitu sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan jasa perorangan 33,63 persen, sektor

perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 32,89 persen, sektor pertanian, perikanan, perburuan dan kehutanan 9,25 persen dan sektor industri pengolahan 4,46 persen.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Bone Tahun 2011

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)	Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, perikanan, perburuan, kehutanan	9,25	64,36	55,58
2	Industri pengolahan	4,46	3,86	3,95
3	Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel	32,89	14,82	17,70
4	Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	33,63	8,87	12,82
5	Lainnya	19,77	8,09	9,95
Jumlah		100 (49.120)	100 (259.048)	100 (308.168)

Sumber : Sakernas 2011

Di daerah pedesaan penyerapan tenaga kerja di dominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perburuan dan kehutanan yaitu 64,36 persen. Kemudian sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 14,82 persen, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebesar 8,87 persen dan sektor industri 3,86 persen.

Penyerapan tenaga kerja dapat juga ditinjau dari status pekerjaan. Di Kabupaten Bone tahun 2011 dari 308.168 orang yang bekerja paling banyak berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar yaitu 30,26 persen, kemudian pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga sebesar 24,71 persen dan buruh/karyawan sebesar 21,03 (Tabel 5.3).

Apabila penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja di sektor formal, maka dapat diidentifikasi penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal dari tujuh kategori status pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Bone tahun 2011 sebesar

23,37 persen yang terdiri dari kategori buruh/karyawan sebesar 21,03 persen dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 2,34 persen. Ini berarti bahwa pekerja formal di Kabupaten Bone masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan pekerja informal.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bone Tahun 2011

No	Status Pekerjaan Utama	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)	Total (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berusaha Sendiri	14,41	15,49	15,32
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga	16,98	32,77	30,26
3	Berusaha dibantu buruh tetap/karyawan	6,91	1,47	2,34
4	Buruh/karyawan/pegawai	48,99	15,73	21,03
5	Pekerja bebas di pertanian	0,29	6,43	5,45
6	Pekerja bebas di non pertanian	0,68	0,93	0,89
7	Pekerja keluarga	11,74	27,18	24,71
Jumlah		100 (49.120)	100 (259.048)	100 (308.168)

Sumber : Sakernas 2011

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, maka di daerah perkotaan lebih banyak penduduk bekerja dengan status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 48,99 persen, kemudian berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap/pekerja keluarga sebesar 16,98 persen dan berusaha sendiri 14,41 persen. Berbeda di daerah pedesaan, lebih banyak penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap/pekerja keluarga yaitu 32,77 persen, kemudian pekerja keluarga sebesar 27,18 persen dan buruh/karyawan/pegawai sebesar 15,73 persen. Tingginya pekerja keluarga di pedesaan diduga disebabkan oleh pekerja di sektor pertanian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Komponen indeks pembangunan manusia 2011 yaitu indeks kesehatan sebesar 75,00; indeks pendidikan 72,53 dan indeks daya beli 64,78.
2. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone mengalami peningkatan tahun 2010 sebesar 70,17, naik menjadi 70,77 tahun 2011 dengan reduksi sortfall 1,79 dengan tetap pada posisi ke-17 se Sulawesi Selatan.
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di perkotaan sebesar 61,09 persen, lebih rendah dari TPAK di pedesaan yaitu 64,43 persen. Sebaliknya untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perkotaan sebesar 7,81 persen, lebih tinggi dari TPT di pedesaan yaitu 5,63 persen.
4. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 melambat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan
5. Pola penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan sangat berbeda di daerah pedesaan. Penyerapan tenaga kerja di perkotaan paling banyak di sector jasa kemasyarakatan, social dan perorangan yaitu sebesar 33,63 persen, sedangkan di daerah pedesaan paling banyak di sector pertanian yaitu 64,36 persen.
6. Berdasarkan status pekerjaan, maka pekerja di perkotaan lebih banyak sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 48,99 persen dan di pedesaan lebih banyak sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap atau dibantu pekerja keluarga yaitu 30,26 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas, disarankan beberapa hal antara lain:

1. Program di bidang pendidikan masih tetap dibutuhkan program pendidikan gratis, program pengentasan buta huruf, karena para penduduk yang telah mengikuti program tersebut berpotensi untuk buta huruf kembali. Perlu juga dilakukan langkah agar murid/siswa yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.

2. Potensi daerah Kabupaten Bone masih bertumpu pada sektor pertanian, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan produktifitas setiap komoditi andalan. Selain itu, juga perlu meningkatkan potensi lain seperti obyek wisata dan perdagangan.
3. Diperlukan Perbaikan infrastruktur dan kewirausahaan kepada masyarakat yang mempunyai hasrat untuk membuka usaha, serta serta tetap mempertahankan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha.

<http://bonekab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BPS KABUPATEN BONE

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Watampone

Telp. (0481) 21054 Fax. (0481) 25220